

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Kebijakan nasional pemerintah Republik Indonesia dalam pembangunan pendidikan untuk kurun waktu 2004-2009 diprioritaskan pada peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan dasar yang bermutu dan penuntasan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Wajardikdas) Sembilan Tahun. Namun di tengah kondisi ekonomi yang sulit, dimana pembiayaan pendidikan terus meningkat, maka pemerintah merasa perlu mencari langkah-langkah nyata agar program ini terus berjalan dan tuntas hingga tahun 2009. Bagaimanapun, pemerintah mengemban amanat konstitusi, sesuai pasal 31 ayat 1 dan 2 UUD 1945, yaitu memberikan pelayanan kebutuhan dasar bagi masyarakat umum. Kebutuhan dasar tersebut adalah kebutuhan pendidikan dasar sembilan tahun. Pemerintah harus melakukan akselerasi pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun yang berkualitas dan terus memberikan akses yang lebih luas kepada kelompok masyarakat yang selama ini tidak tersentuh dunia pendidikan.

Salah satu wujud pelaksanaan kebijakan tersebut dengan menyelenggarakan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Menurut Kementerian Agama (2007, 4), bantuan ini diberikan bagi siswa SD, MI, SDLB, SMP, MTs dan SMPLB negeri/swasta dan Pondok Pesantren Salafiyah (PPS) serta sekolah keagamaan non Islam setara SD dan SMP yang menyelenggarakan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun. Dengan program ini diharapkan dapat menjamin keberlangsungan proses pendidikan di satuan pendidikan tingkat dasar, yang tentu saja akan dapat meringankan beban masyarakat dari biaya operasional pendidikan.

Untuk tingkat nasional, program BOS telah dimulai sejak tahun 2005. Pengelolaan dana bantuan untuk seluruh lembaga pendidikan tingkat dasar, SD/MI dan SMP/MTs berada dalam naungan dan tanggung jawab Departemen Pendidikan Nasional. Namun sejak tahun anggaran 2007, pengelolaan dana untuk MI dan MTs dikembalikan pada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI yang menaungi pendidikan di madrasah dan pesantren. Selain itu, sumber dananya pun berubah. Pada tahun 2005, dana BOS berasal dari kompensasi pengurangan subsidi bahan bakar minyak bidang pendidikan, namun sejak tahun 2007 sumber dana BOS diambil dari APBN dan tidak lagi dari subsidi BBM.

Dalam Rencana Jangka Panjang dan Menengah (RJPM) Kementerian Agama tahun 2004-2009 (saat itu masih disebut Departemen Agama) bidang pendidikan, menyatakan bahwa ada tiga pilar yang harus dicapai dalam bidang pendidikan. *Pertama*, pemerataan dan perluasan akses; *kedua*, peningkatan mutu, relevansi dan daya saing; dan *ketiga*, peningkatan tata kelola pemerintahan, akuntabilitas dan pencitraan (Kementerian Agama, 2009: 3), maka Program BOS diharapkan dapat mendukung RJPM tersebut. Setelah lebih kurang dua tahun berjalan (2007-2009), pelaksanaan BOS mengalami pasang surut. Dan pada tahun 2009, program BOS masih terus dilanjutkan dengan menyempurnakan berbagai sisi dari implementasinya.

Khusus di Kabupaten Ogan Ilir, implementasi BOS ditemukan banyak kendala. Kendala yang dihadapi umumnya terjadi di tingkat satuan pendidikan/madrasah dan bersifat teknis. Tim Manajemen BOS tingkat satuan pendidikan/madrasah masih memiliki pemahaman yang terbatas dalam mengimplementasikan dana tersebut. Sebagai contoh kasus dapat dilihat dari data Seksi Kependidikan Agama Islam Kantor Kementerian Agama Islam Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2009, tentang hasil audit penggunaan dana BOS madrasah Tahun Anggaran 2008 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Dari 26 madrasah yang dijadikan sampel, ada 20

madrasah atau 76,92% yang bermasalah dalam pengelolaan dan pemanfaatan dana tersebut (Tabel 1). Hasil ini menunjukkan bahwa sebagian besar madrasah di Kabupaten Ogan Ilir masih mengalami masalah dalam mengimplementasikan dana BOS.

Tabel 1. Rekapitulasi Temuan BPKP terhadap Audit Dana BOS pada Madrasah di Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2008

N O	MADRASAH SAMPEL	Kelebihan Penerimaan Dana BOS	Penggunaan Dana BOS yang tidak sesuai Pedoman	Dana BOS dipergunakan untuk hal yang tidak sesuai	Pajak yang belum disetor ke negara	TOTAL
1	Mi Nurul Falah	254,000.00	500,000.00	1,400,000.00	-	2,154,000.00
2	MI Al Hijrah	1,206,000.00	2,950,000.00	2,400,000.00	-	6,556,000.00
3	MI Masdarul Ulum	127,000.00	200,000.00	3,690,000.00	-	4,017,000.00
4	MI Darussalam	508,000.00	407,000.00	-	-	915,000.00
5	MI Assalafiyah	-	150,000.00	2,430,000.00	-	2,580,000.00
6	MI Nurul Hikmah	-	450,000.00	-	-	450,000.00
7	MTs Nurul Iman	88,500.00	88,500.00	-	-	177,000.00
8	MTs Nurul Yaqin	442,500.00	-	1,200,000.00	-	1,642,500.00
9	MTs Darul Falah	177,000.00	-	600,000.00	-	777,000.00
10	MTs Al Furqon	1,858,500.00	-	4,020,000.00	-	5,878,500.00
11	MTs Bahrul Marom	1,150,000.00	-	1,130,000.00	-	2,280,000.00
12	MTs Darul Iman	-	421,000.00	-	-	421,000.00
13	MTs Tarbiyatussibyan	-	260,000.00	570,000.00	-	830,000.00
14	MTs Muhammadiyah	-	475,000.00	4,700,000.00	-	5,175,000.00
15	MTs Nurussalam	-	530,000.00	1,200,000.00	-	1,730,000.00
16	MTs N Tanjung Raja	-	5,250,000.00	17,220,000.00	4,335,630.00	26,805,630.00
17	MTs Assalafiyah	-	740,000.00	360,000.00	-	1,100,000.00
18	MTs Nurul Amal Pancasila	-	315,000.00	441,000.00	65,100.00	821,100.00
19	MTs N Sakatiga	-	-	15,000,000.00	4,762,047.00	19,762,047.00
20	MTs Nurul Hilal	-	-	2,700,000.00	114,750.00	2,814,750.00
	JUMLAH	5,811,500.00	12,736,500.00	59,061,000.00	9,277,527.00	86,886,527.00

Sumber: Seksi Kependidikan Agama Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ogan Ilir, 2009

Dari Tabel 1. dapat diketahui bahwa untuk skala Kabupaten Ogan Ilir, total dana BOS yang tidak sesuai peruntukannya dan harus dikembalikan ke Kas Negara sebesar Rp. 86.886.527,- (Delapan Puluh Enam Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Lima Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah). Hal ini sangat disayangkan, mengingat jumlah dana yang cukup besar ini seharusnya dapat dimanfaatkan oleh madrasah sebagai

sumber dana pendidikan bila pengelolaannya sesuai dengan prinsip-prinsip Manajemen Keuangan Madrasah/Sekolah.

Kabupaten Ogan Ilir merupakan kabupaten penyangga ibukota Provinsi Sumatera Selatan. Dari data EMIS (*Education Manajement Information System*) Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumsel tahun 2008, madrasah di Kabupaten Ogan Ilir menempati urutan ke-8 tertinggi dari 14 kabupaten/Kota Se-Sumsel, yaitu 12 Madrasah Ibtidaiyah dan 40 Madrasah Tsanawiyah (Tabel 2). Dengan jumlah yang besar ini setidaknya dapat dijadikan gambaran tentang pelaksanaan BOS untuk skala provinsi.

Tabel 2. Daftar Jumlah Madrasah Se-Provinsi Sumsel Tahun 2008

NO	KABUPATEN/ KOTA	JUMLAH MI			JUMLAH MTs			TOTAL
		Negeri	Swasta	Jumlah	Negeri	Swasta	Jumlah	
1	OKU Timur	4	72	76	3	42	45	121
2	Palembang	2	84	86	2	24	26	112
3	OKI	0	54	54	2	56	58	112
4	Banyuasin	0	50	50	0	55	55	105
5	Muara Enim	11	36	47	3	29	32	79
6	Musi Rawas	2	35	37	2	31	33	70
7	Musi Banyuasin	5	22	27	4	34	38	65
8	Ogan Ilir	1	11	12	2	38	40	52
9	Lahat	5	22	27	5	9	14	41
10	OKU Selatan	3	11	14	4	17	21	35
11	OKU	2	16	18	1	10	11	29
12	Lubuk Linggau	1	7	8	1	7	8	16
13	Pagaralam	1	7	8	1	3	4	12
14	Prabumulih	1	1	2	1	5	6	8
	Jumlah	38	428	466	31	360	391	857

Sumber : Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumsel, 2008

Dana BOS merupakan salah satu sumber dana pendidikan. Sebenarnya, dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional telah tercantum prinsip-prinsip manajemen keuangan madrasah/sekolah. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 pasal 48 ayat 1 berbunyi, "Pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas publik". Ayat ini menjadi acuan dalam manajemen keuangan sekolah/madrasah secara umum, dan pengelolaan BOS secara khusus. Jadi,

bila implementasi BOS mengacu pada prinsip-prinsip ini, seharusnya kekeliruan dalam mengimplementasikan dana BOS dapat diperkecil. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian tentang efektivitas implementasi dana BOS, sejauhmana implementasi dana BOS efektif sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut. Selain itu, dalam implementasi kebijakan, ada banyak faktor yang mempengaruhi. Oleh karena itu, perlu juga dikaji faktor-faktor yang mempengaruhi implemetasi kebijakan BOS.

Telah disinggung di awal bahwa program BOS diharapkan dapat mendukung RJPM Kementerian Agama bidang pendidikan. Khusus untuk tahun 2009, program BOS dilaksanakan dalam konteks pembangunan pendidikan di pilar kedua, yakni peningkatan mutu, relevansi dan daya saing (Kementerian Agama, 2009, 2). Hal ini berkenaan dengan pelaksanaan program Wajar Dikdas sembilan tahun yang bermutu yang harus tuntas tahun 2009. Ini artinya, implementasi dana BOS benar-benar harus ditujukan untuk menyelenggarakan pendidikan yang bermutu. Berdasar hal tersebut, perlu juga dilakukan penelitian yang mengacu pada aspek implementasi dana BOS untuk mengetahui sejauhmana dana ini dimanfaatkan pada hal-hal yang berkenaan dengan peningkatan mutu pendidikan.

Dari dua latar belakang tersebut, penulis melakukan penelitian berjudul, Efektivitas Implementasi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Madrasah di Kabupaten Ogan Ilir, khususnya untuk Tahun Anggaran 2009. Penulis ingin mengetahui sejauh mana efektivitas implementasi pengelolaan BOS bila ditinjau dari aspek prinsip-prinsip manajemen keuangan sekolah/madrasah dan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan tersebut. Hasil penelitian ini diharapkan tidak saja dapat dimanfaatkan untuk pengembangan keilmuan khususnya manajemen pendidikan, tapi juga sebagai bahan masukan bagi para pembuat kebijakan untuk memperbaiki manajemen pengelolaan BOS, khususnya di tingkat madrasah.

Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang dikemukakan, ada beberapa masalah yang terkait dengan implementasi dana BOS pada madrasah di Kabupaten Ogan Ilir. Masalah-masalah tersebut antara lain:

1. Kualitas Sumber Daya Manusia pengelola. Ini berkaitan dengan kurangnya kemampuan dan pemahaman Tim Manajemen BOS tingkat madrasah dalam hal administrasi keuangan, seperti menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Madrasah, pembukuan dan penyusunan Laporan Pertanggung Jawaban;
2. Lokasi madrasah yang tersebar dan terpencil menyebabkan akses informasi tentang Program BOS ke dan dari madrasah terganggu;
3. Kurang intensifnya pembinaan dan monitor yang dilakukan Tim Manajemen BOS tingkat Kabupaten menyebabkan pengelolaan dana BOS tingkat madrasah kurang terkontrol;
4. Kebijakan penggunaan dana BOS yang berubah-ubah setiap tahun menyebabkan pengelola salah dalam menginterpretasikan prinsip dan ketentuan yang harus dipedomani dalam pengelolaan dana;
5. Kultur madrasah (khusus madrasah swasta) yang masih tradisional, dimana kebijakan madrasah banyak ditentukan oleh pemilik yayasan menjadikan pengelolaan dana BOS tidak transparan.

Perumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang dikemukakan tersebut, maka masalah yang dapat dirumuskan, yaitu:

1. Bagaimana efektivitas implementasi dana BOS pada madrasah di Kabupaten Ogan Ilir?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi implementasi BOS di Kabupaten Ogan Ilir?

Pembatasan Masalah

Untuk mengetahui efektivitas implementasi dana BOS pada madrasah di Kabupaten Ogan Ilir, maka penelitian dibatasi pada beberapa hal, yaitu:

1. Efektivitas implementasi BOS dilihat dari lima aspek, yaitu: ketepatan waktu, ketepatan jumlah, ketepatan sasaran, ketepatan penggunaan dan ketepatan prosedur;
2. Untuk ketepatan prosedur dilihat dari implementasi BOS tingkat madrasah meliputi: perencanaan (*input*), pelaksanaan kegiatan dan evaluasi (*output*);
3. Penelitian dilakukan terhadap implementasi dana BOS Tahun Anggaran 2009.

Tujuann Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui efektivitas implementasi dana BOS pada madrasah di Kabupaten Ogan Ilir.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi BOS di Kabupaten Ogan Ilir.

Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan untuk pengembangan keilmuan khususnya manajemen pendidikan.

2. Manfaat Praktis

Sebagai bahan masukan bagi para pembuat kebijakan untuk memperbaiki implementasi dana BOS khususnya di tingkat madrasah.

Tinjauan Pustaka

Mengingat BOS merupakan program pemerintah yang sangat penting dalam rangka menuntaskan Program Wajar Dikdas Sembilan Tahun, juga untuk memberikan pelayanan pendidikan bermutu, maka banyak penelitian atau kajian yang dilakukan berkenaan dengan BOS. Namun sebagian besar penelitian tersebut berkaitan dengan pengaruh BOS terhadap mutu pendidikan. Adapun penelitian yang berkaitan dengan pengelolaan BOS yang peneliti lihat masih sangat sedikit.

Penelitian BOS yang berkenaan dengan mutu pendidikan diantaranya dilakukan oleh Hakim, L. (2007). Ia melakukan penelitian berjudul, "Analisis Pemantauan *Outcome* Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Madrasah Tsanawiyah Gresik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum *outcome* BOS sudah baik, akan tetapi untuk partisipasi masyarakat ada kecenderungan makin menurun. Ini terjadi karena para pembuat kebijakan di hadapkan pada persoalan untuk menuntaskan wajib belajar tetapi di sisi lain tuntutan mutu pendidikan harus ditingkatkan dan ini membutuhkan biaya yang cukup besar. Upaya perbaikan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan program BOS sangat diperlukan oleh para pembuat kebijakan guna lebih sempurnanya program ini. Laporan hasil penelitian yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (2007) yang berjudul "Dampak Pemberian Bantuan Operasional Sekolah terhadap Peningkatan Mutu dan Pemerataan Pendidikan" menunjukkan bahwa BOS memberikan dampak positif terhadap peningkatan mutu sekolah, peningkatan layanan bidang pendidikan, dan pengembangan SDM dapat berkembang. Dana BOS juga berdampak pada pengurangan biaya sekolah, meskipun beban orang tua murid terhadap biaya pendidikan masih cukup tinggi. Ini berarti, bahwa

hakikatnya BOS berdampak positif terhadap peningkatan mutu pendidikan, khususnya di sekolah negeri.

Dari kedua penelitian tersebut, persamaan dengan penelitian yang peneliti laksanakan yaitu pada pengkajian tentang BOS. Perbedaannya, peneliti fokus pada pengkajian aspek pengelolaan BOS dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan, sedangkan kedua penelitian tersebut fokus pada aspek pengaruh BOS terhadap mutu pendidikan. Maka peneliti menilai bahwa penelitian ini layak dilakukan.

Sedangkan penelitian yang berkaitan dengan implementasi dana pendidikan, diantaranya dilakukan oleh Nugraha (2005). Ia melakukan penelitian berjudul, "Pengelolaan Dana Pendidikan dan Dampaknya terhadap Kelangsungan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Bandung". Penelitian ini mengkaji tentang aspek pengelolaan dana pendidikan di Kabupaten Bandung serta dampaknya terhadap kelangsungan penyelenggaraan pendidikan. Dari penelitian ini diketahui bahwa dalam pelaksanaannya, pengelolaan dana pendidikan belum sepenuhnya menerapkan fungsi perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan secara bersinergi.

Persamaan dengan penelitian yang akan dilaksanakan yaitu penelitian sama-sama difokuskan pada aspek implementasi dana pendidikan. Perbedaannya pada dana pendidikan yang dikaji masih bersifat umum, sedangkan peneliti telah fokus pada salah satu sumber dana pendidikan yaitu BOS. Jadi peneliti melihat bahwa penelitian ini masih layak dilakukan.

Khusus untuk penelitian implementasi dana BOS dilakukan oleh Nuraini, D (2008). Ia melakukan penelitian berjudul, "Analisis Implementasi Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Sekolah Dasar Negeri di Kota Jakarta Selatan. Penelitian ini menggunakan teori George Edward III (1980) dengan metode kualitatif. Dari penelitian ini diketahui bahwa implementasi program BOS pada SDN di kota Jakarta Selatan cukup efektif, meskipun tidak cukup sempurna.

Persamaan dengan penelitian yang dilaksanakan yaitu penelitian ini sama-sama mengkaji efektivitas implementasi dana BOS dengan menggunakan teori George Edwards III. Perbedaannya, penelitian Nuraini dilakukan pada SD negeri di Kota Jakarta, sedangkan penelitian ini dilakukan pada madrasah di Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Jadi peneliti melihat bahwa penelitian ini masih layak dilakukan.

Dari beberapa penelitian tersebut, maka peneliti tertarik meneliti efektivitas implementasi dana BOS pada madrasah di Kabupaten Ogan Ilir. Penelitian ini ditinjau dari perspektif manajemen keuangan sekolah/madrasah. Sejauh mana pengelolaan dana BOS di Kabupaten Ogan Ilir sesuai dengan prinsip-prinsip manajemen keuangan sekolah/madrasah.

Metodologi Penelitian

Menurut Sugiyono (2005: 3), metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan yang dapat ditentukan, dibuktikan dan dikembangkan suatu pengetahuan tertentu sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah. Data yang diperoleh melalui sistematika tertentu dikumpulkan, dianalisis hingga diperoleh kesimpulan.

Dalam suatu penelitian, penentuan jenis penelitian sangat penting. Hal ini bertujuan untuk memperoleh ketepatan data sehingga ketelitian jawaban dari pertanyaan penelitian dapat terungkap dengan tepat pula. Ditinjau dari jenisnya, penelitian didasarkan atas empat jenis, yaitu penelitian eksploratif, *development*/pengembangan, verifikatif dan penelitian kebijakan (Arikunto, 1998: 8). Adapun penelitian ini termasuk penelitian kebijakan, karena objek yang diteliti adalah program BOS, yaitu tindakan atau kebijakan pemerintah di bidang pendidikan yang diberlakukan secara nasional bagi jenjang pendidikan dasar. Penelitian kebijakan adalah penelitian empirik yang dilakukan

untuk memverifikasi proporsi-proporsi mengenai beberapa aspek hubungan alat-tujuan dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan (Mayer dan Greenwood, 1984: 66).

Adapun metode yang digunakan yaitu metode deskriptif melalui pendekatan survei. Menurut Arikunto (2009: 234), penelitian deskriptif tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis tertentu, tapi hanya menggambarkan "apa adanya" tentang suatu variabel, gejala atau keadaan. Arry *dalam* Sudjana dan Ibrahim (2009: 74) menyatakan, pendekatan survei bertujuan untuk mengungkap jawaban yang berkenaan dengan variabel penelitian. Selain itu, survei sangat membantu memecahkan masalah-masalah praktis yang berkenaan dengan kebijakan pemerintah. Melalui pendekatan ini, kondisi-kondisi nyata yang ada di lapangan dibandingkan dengan kriteria-kriteria yang telah dirumuskan.

Definisi Konsep

Menurut Singarimbun dan Effendi (1995: 33), Definisi Konsep adalah istilah dan definisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak kejadian, keadaan, kelompok, atau individu yang menjadi pusat perhatian ilmu sosial. Definisi Konsep juga berarti abstraksi atau sejumlah karakteristik kejadian, keadaan, kelompok atau individu tertentu. Adapun definisi konsep dalam penelitian ini yaitu:

1. Efektivitas adalah suatu kondisi, derajat atau tingkatan yang menyatakan bahwa suatu aktivitas atau tindakan mencapai tujuan operasional yang telah dirumuskan. Efektivitas tidak hanya berdasarkan pada keluaran saja, tapi kriteria efektivitas harus mencerminkan keseluruhan siklus *input-proses-output*, tidak hanya *output* atau hasil, serta harus mencerminkan hubungan timbal balik.
2. Implementasi adalah pelaksanaan keputusan biasanya dalam bentuk Undang-undang, perintah, atau keputusan penting terkait dengan masalah yang harus

dihadapi, menyebutkan secara tegas tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara mengatur proses implementasinya.

3. Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah program pemerintah untuk penyediaan pendanaan biaya nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar.
4. Efektivitas Implementasi Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah suatu kondisi, derajat atau tingkatan yang menyatakan bahwa pelaksanaan program pemerintah untuk menyediakan pendanaan biaya nonpersonalia bagi pendidikan dasar sebagai program wajib belajar sesuai dengan ketentuan atau kriteria yang telah ditetapkan.

Wilayah Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada madrasah yang tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Ogan Ilir. Secara rinci dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Wilayah Penelitian

No	Kecamatan	Madrasah		
		MI	MTs	Jumlah
1	Indralaya	3	3	6
2	Indralaya Utara	0	1	1
3	Indralaya Selatan	0	1	1
4	Tanjung Batu	0	11	11
5	Payaraman	2	4	6
6	Lubuk Keliat	0	3	3
7	Muara kuang	1	3	4
8	Rambang Kuang	0	1	1
9	Rantau Panjang	1	1	2
10	Tanjung Raja	0	2	2
11	Sungai Pinang	1	1	2
12	Rantau Alai	0	1	1
13	Kandis	1	1	2
14	Pemulutan	2	3	5
15	Pemulutan Selatan	1	1	2
16	Pemulutan Barat	0	1	1
	Total	12	38	50

Sumber : Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ogan Ilir, 2010

Sumber Data

Arikunto (1998: 107) menyatakan, data adalah hasil pencatatan penelitian, baik berupa fakta atau angka. Sedangkan sumber data adalah subjek dimana data dapat diperoleh, disebut juga dengan subjek penelitian (populasi). Populasi penelitian ini adalah Kepala Madrasah penerima dana BOS di Kabupaten Ogan Ilir. Madrasah di Kabupaten Ogan Ilir, baik MI maupun MTs berjumlah 50 madrasah. Berarti jumlah populasi adalah 50 populasi. Mengingat keadaan subjek dalam populasi yang homogen serta lokasi geografis madrasah yang tersebar luas, maka penulis membatasi jumlah subjek penelitian yang diambil, yakni dengan melaksanakan penelitian sampel. Ini sejalan dengan apa yang dinyatakan Arikunto (1998: 116), bahwa penelitian sampel boleh dilaksanakan apabila keadaan subjek dalam populasi homogen.

Penentuan ukuran sampel mengacu apa yang dikemukakan Arikunto (2009: 94), bahwa 30 adalah batas antara sampel kecil dengan sampel besar. Mengingat jumlah populasi yang hanya 50, maka jumlah sampel 30 dianggap representatif. Adapun teknik penyampelan dilakukan secara random, yakni dengan mengundi secara acak setiap anggota populasi, dan yang masuk ke dalam undian itulah yang akan dijadikan sampel. Dengan teknik ini, peneliti dimungkinkan mengambil sampel tanpa dipengaruhi faktor subjektif, sehingga setiap unit yang menjadi anggota populasi memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi anggota sampel (Ali, 1992: 53). Anggota sampel terpilih yang berjumlah 30 sampel akan dijadikan responden dalam penelitian ini. Responden adalah orang yang dimintai keterangan tentang suatu fakta (Arikunto, 1998: 122).

Selain itu, data juga diperoleh dari informan. Informan adalah orang yang memberi informasi (Arikunto, 1998: 122). Dalam penelitian ini, informan adalah Tim Manajemen BOS tingkat Kabupaten Ogan Ilir yang terdiri dari Manajer, Seksi Data,

Seksi Humas dan Seksi Monitoring dan Evaluasi. Selain itu, informan lain yaitu Komite Madrasah dan guru.

Berdasarkan sumber data tersebut, maka jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Data Primer, yaitu data yang langsung diperoleh dari sumber data di lapangan. Data ini berupa hasil penyebaran angket pada 30 responden, hasil wawancara dengan Tim Manajemen BOS tingkat Kabupaten Ogan Ilir, Komite Madrasah, guru dan hasil observasi penulis di lapangan.
2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh berupa arsip dokumen dan laporan BOS yang ada pada Tim Manajemen BOS tingkat Kabupaten dan Madrasah Tahun Anggaran 2009. Arsip tersebut meliputi Surat Keputusan Tim Manajemen BOS tingkat Madrasah, Surat Pernyataan Jumlah Siswa, Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB), Statistik Madrasah Penerima BOS dan Laporan Pertanggung Jawaban keuangan BOS.

Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang benar-benar menggambarkan keadaan yang sebenarnya, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yang sesuai dengan data yang diinginkan. Teknik pengumpulan data ini bertujuan menjawab Definisi Operasional yang telah dijabarkan sebelumnya. Adapun teknik pengumpulan data tersebut antara lain yaitu:

1. Angket, yaitu pengumpulan data dengan menggunakan daftar pertanyaan yang diberikan pada 30 responden sebagai alat untuk menjaring data tentang efektivitas implementasi BOS pada aspek ketepatan waktu penyaluran dana, ketepatan jumlah dana yang diterima dan prosedur penggunaan dana. Pertanyaan yang diajukan bersifat tertutup.

2. Wawancara, yaitu tanya jawab yang dilakukan peneliti terhadap informan dengan menggunakan pedoman wawancara secara mendalam. Pertanyaan yang diajukan kepada obyek penelitian dipandu dengan *interview guide* dan pertanyaan tersebut bisa berkembang sedemikian rupa sesuai dengan kebutuhan dan kedalaman data yang ingin diperoleh. Pertanyaan diajukan pada Tim Manajemen BOS tingkat Kabupaten untuk mendapatkan informasi tentang efektivitas implementasi BOS pada aspek ketepatan waktu pencairan dana dan ketepatan sasaran madrasah penerima BOS. Wawancara juga dilakukan pada beberapa Komite Madrasah dan guru yang dipilih secara acak sebagai klarifikasi jawaban angket responden.
3. Observasi, yaitu mengadakan pengamatan secara langsung pada madrasah dimana kepala madrasahnya dijadikan sebagai responden.
4. Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data melalui benda-benda tertulis berupa arsip dokumen yang berkenaan dengan implementasi dana BOS Tahun Anggaran 2009. Dokumentasi digunakan untuk mendapatkan informasi tentang efektivitas implementasi BOS pada aspek ketepatan data jumlah penerima BOS dan ketepatan penggunaan dana BOS.

Validitas Data

Dalam penelitian ini validitas atau keabsahan data diperiksa dengan metode triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk kepentingan pengecekan data atau sebagai pembandingan terhadap data itu (Moleong, 2004: 178).

Triangulation menurut Patton dalam Moleong (2004: 178–179) dibagi menjadi (empat), yaitu:

1. Triangulasi Sumber, yaitu membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode

kualitatif. Data yang diperoleh berupa angket dan wawancara yang dilakukan lebih dari satu kali dalam periode waktu tertentu.

2. Triangulasi Metode, yaitu dengan menggunakan dua strategi; (1) pengecekan terhadap derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian dengan beberapa teknik pengumpulan data, (2) pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama.
3. Triangulasi Peneliti, yakni dengan memanfaatkan peneliti atau pengamat lainnya untuk keperluan pengecekan kembali derajat kepercayaan.
4. Triangulasi Teori, yakni melakukan penelitian tentang topik yang sama dan datanya dianalisa dengan menggunakan beberapa perspektif teori yang berbeda.

Dalam penelitian ini, variasi teknik yang digunakan adalah triangulasi model sumber. Hal ini dilakukan karena pengambilan data dalam penelitian ini menggunakan angket, wawancara dan dokumentasi. Langkah-langkah yang dilakukan meliputi:

1. Membandingkan data hasil angket dengan data hasil wawancara;
2. Membandingkan data hasil wawancara dengan isi dokumen.

Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Analisis Data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan (Singarimbun, 1995: 263). Semua data dianalisis dengan teknik analisis deskriptif kualitatif. Menurut Arikunto (2009, 269), analisis dengan teknik deskriptif kualitatif adalah memberikan predikat pada variabel yang diteliti sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Predikat tersebut dalam bentuk peringkat yang sebanding dengan atau atas dasar kondisi yang diinginkan. Sebagai langkah awal, data diukur dalam bentuk persentase kemudian ditransfer ke predikat.

Dalam penelitian ini, hasil jawaban responden dari angket ditabulasikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi kemudian dipersentasekan. Hasil penelitian dalam

bentuk angka tersebut kemudian ditransfer dalam bentuk predikat. Dalam hal ini, predikat yang digunakan dua tingkatan, yaitu Efektif dan Tidak Efektif.

Data hasil wawancara mendalam ditranskrip, kemudian dikelompokkan sesuai dengan tema-tema penting penelitian. Selain hasil wawancara, informasi juga diperoleh melalui hasil observasi dan dokumentasi.